



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 6 Nomor 4, 2023
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 27/11/2023
 Reviewed : 07/12/2023
 Accepted : 09/12/2023
 Published : 12/12/2023

I Made Kartika¹
 Putu Ronny Angga
 Mahendra²

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENANGKAL INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISME

Abstrak

Pancasila adalah ideologi negara yang memiliki sifat terbuka artinya dapat menerima paham-paham dari luar sesuai dengan perkembangan zaman. Namun bukan berarti paham dari luar dapat bebas masuk begitu saja ke Indonesia, paham luar dibatasi oleh kelima asas dari Pancasila. Radikalisme adalah permasalahan yang muncul akibat dari salah tangkap mengenai sebuah paham dari luar sehingga masyarakat yang mempercayainya melupakan Pancasila dan memilih mendukung ideologi luar dengan keras. Sejak beberapa tahun terakhir radikalisme sudah merajalela di Indonesia bahkan sudah masuk ke dunia pendidikan dan kalangan kaum muda. Ada banyak faktor penyebab mengapa radikalisme sangat mudah masuk ke Indonesia yaitu mulai dari faktor pemikiran, faktor ekonomi, faktor politik, faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor pendidikan. Semua faktor tersebut menjadi latar belakang radikalisme masuk ke Indonesia namun yang pasti itu semua mengerucut pada satu, yaitu menurunnya penerapan Pancasila dalam kehidupan. Maka dari itu solusinya adalah revitalisasi Pancasila pada kehidupan sehari-hari, seluruh warga negara harus bersinergi untuk sama-sama meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Implementasi Nilai Pancasila, Intoleransi, Radikalisme, Terorisme

Abstract

Pancasila is a state ideology that has an open nature, meaning it can accept ideas from outside in accordance with current developments. However, this does not mean that understanding from outside can freely enter Indonesia, outside understanding is limited by the five principles of Pancasila. Radicalism is a problem that arises as a result of being misunderstood by an understanding from outside so that people who believe in it forget about Pancasila and choose to strongly support outside ideologies. Since the last few years, radicalism has become rampant in Indonesia and has even entered the world of education and among young people. There are many factors that cause radicalism to easily enter Indonesia, starting from thought factors, economic factors, political factors, psychological factors, social factors and educational factors. All of these factors are the background for radicalism entering Indonesia, but what is certain is that they all converge on one thing, namely the decline in the application of Pancasila in life. Therefore, the solution is to revitalize Pancasila in everyday life, all citizens must work together to jointly increase the application of Pancasila values.

Keywords: Implementation of Pancasila Values, Intolerance, Radicalism, Terrorism

PENDAHULUAN

Pancasila bagi negara Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat tinggi. Terdapat bermacam pengertian kedudukan dan fungsi pancasila yang masing-masing harus di pahami sesuai dengan konteksnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai ideology bangsa dan negara Indonesia. Dan masih banyak kedudukan dan fungsi Pancasila itu bukanlah berdiri secara sendiri-sendiri namun bilamana di kelompokkan maka akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi pancasila yang sebagai dasar Filsafat Negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia (Kaelan, 2002:46). Sebagai Dasar Negara maka Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk mengatur segala bentuk pemerintahan di Negara Indonesia. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup Negara Indonesia mempunyai pengertian bahwa Pancasila mempunyai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki bangsa indonesia yang diyakini

^{1,2)} Progam Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dwijendra
 email: madekartika@undwi.ac.id, puturonny87@gmail.com

kebenarannya menjadi petunjuk hidup sehari-hari, menjadi petunjuk arah semua kegiatan hidup dan kehidupan di dalam semua bidang Indonesia (Kaelan, 2002:46). Adanya fungsi dan kedudukan Pancasila bagi suatu Negara ini harus di Implementasikan dengan baik kepada semua warga Negara khususnya para pelajar penerus bangsa.

Di era reformasi saat ini, telah menguat kembali ideologi yang mengatasnamakan agama yang terefleksikan dalam ideologi, paham, maupun mazhab radikalisme, fundamentalisme, dan sektarianisme yang berpotensi melahirkan terorisme, dan bahkan separatisme. Maraknya aksi menolak keberagaman, menentang kebhinekaan, dan menolak dasar negara Pancasila. Hal-hal ini akan menjadi benih-benih yang mendorong sikap, perilaku, dan tindakan terorisme yang ada di tengah masyarakat. Perilaku radikalisme tercemin dalam penolakan terhadap agama lain dan mengkafirkan umat agama lain. Perilaku fundamentalisme terefleksi dari perspektif nilai agamanya yang paling benar dan agama lain salah yang dilakukan secara keras dan mendasar. Sektarianisme terwujud dalam maraknya ajaran sesat, ujaran kebencian, dan tidak mau berinteraksi dengan ajaran agama lainnya.

Maraknya praktek radikalisme yang mengarah pada terorisme sebenarnya bermula dari benih pemikiran dan tindakan intoleran yang ada dalam kelompok masyarakat. Intoleransi yang terjadi di tengah masyarakat saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena tidak hanya menjangkiti sebagian organisasi masyarakat, namun juga menjadi virus yang menyerang pemuda, remaja, siswa, mahasiswa, dan generasi muda Indonesia. Intoleransi ini juga telah menyebar ke dalam dunia pendidikan, baik di sekolah dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Banyak praktik perilaku dalam keseharian yang dijalankan dengan memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Keistimewaan bangsa Indonesia lainnya adalah memiliki dasar dan filosofi dalam kehidupan bernegara yakni Pancasila. Pancasila adalah identitas dan jati diri Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Dengan demikian segala bentuk tindakan yang dijalankan oleh seluruh orang Indonesia harus selalu berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya jika terdapat kelompok yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya maka harus dapat disingkirkan dari bumi Indonesia.

Sebagai bangsa yang telah memiliki konsensus dasar nasional yang sering disebut dengan Empat Pilar Kebangsaan terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, merupakan anugerah dari Tuhan kepada bangsa Indonesia sebagai pemersatu di tengah keberagaman yang dimiliki. Nilai-Nilai Pancasila selalu ada di dalamnya, kebiasaan, budaya, agama, dan tradisi yang dianut masyarakat Indonesia, artinya ada kaitan antara hidup manusia dengan nilai-nilai Pancasila dalam tradisi dan Budaya sangat pengaruh pada masyarakat karena nilai-nilai Pancasila menjadi inti dari pedoman masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala keputusan, tindakan dan perilaku sebagai penyelenggara negara harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan terhadap sesama.

Pengalaman menunjukkan bahwa Pancasila telah mengalami berbagai bentuk ancaman dan pengkhianatan oleh sekelompok orang, akan tetapi sampai saat ini Pancasila masih berdiri kokoh sebagai dasar negara dan ideologi negara. Secara historis ideologi Pancasila pernah mencoba untuk digantikan dengan ideologi komunis yang dijalankan melalui pemberontakan G30S/PKI dan juga pertentangan dengan gerakan DI/TII di Indonesia saat itu. Pancasila juga tengah mengalami tantangan serius, dimana terdapat organisasi-organisasi masyarakat menginginkan Pancasila diganti, mengubah bentuk NKRI menjadi khilafah, Pancasila sebagai salah satu bentuk kafir serta penganut Pancasila sebagai thogut.

Dalam konteks ini, dapat dilakukan suatu identifikasi masalah terkait dengan eksistensi nilai-nilai Pancasila di era modern saat ini, dengan maraknya intoleransi, radikalisme, dan terorisme di tengah kehidupan masyarakat. Beberapa identifikasi tersebut antara lain : 1) nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan bela negara yang ada di tengah masyarakat mengalami pelemahan dan degradasi baik di kalangan pemuda, mahasiswa, aparatur negara, organisasi masyarakat, LSM, dan komponen bangsa lainnya. 2) Pancasila dianggap nilai yang kuno/ jadul/ dan ndeso yang kurang kekinian. 3) Pancasila hanya dianggap sebagai lip service oleh para pemain dan aktor politik yang tidak dihayati, dijiwai dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 4) keinginan mengganti bentuk NKRI dengan bentuk negara lain. 5) Bhinneka Tunggal Ika yang di dalamnya menjamin suatu kesatuan di tengah keberagaman/ kemajemukan tengah mengalami ancaman dengan kesewenang-wenangan mayoritas dan minoritas yang diasingkan yang menjadikan adanya diskriminasi, isolasi, marginalisasi, dan represi yang tentu mengarah pada disharmoni sosial.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini mencoba menggambarkan dan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai penangkal, penangkis, dan penolak segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Diibaratkan dengan orang yang sedang sakit, Pancasila adalah obat yang mujarab dalam mengobati bangsa Indonesia yang tengah terjangkiti virus intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Pancasila juga menjadi imun yang mampu menangkal virus-virus tersebut masuk ke dalam tubuh bangsa Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang menggambarkan apa adanya, tanpa adanya fakta dan data yang ditutupi, mengungkap sebab akibat dan mengungkap makna dibalik peristiwa, kejadian, dan gejala tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jenis kualitatif. Dilakukan dengan menganalisa secara hakiki penyebab suatu peristiwa secara terang, jelas, dan menggunakan kata, kalimat, dan narasi yang komprehensif, sistematis, dan penuh makna. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi, studi literatur, maupun studi pustaka yang dilakukan dengan membaca, menelaah, menganalisis, dan memaknai berbagai laporan penelitian, buku, jurnal, surat kabar, majalah, maupun internet daring yang terkait dengan fokus penelitian ini. Dokumen berupa pustaka dipilah, disajikan, dan dinarasikan secara berurutan untuk membuktikan antara fakta satu dengan fakta lainnya, mengkaitkan peristiwa satu dengan peristiwa lainnya, mengkaitkan gejala satu dengan gejala lainnya, sehingga dapat memperkuat dan membuktikan argumentasi maupun menjawab proposisi teoritik dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relasi Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme

Maraknya sikap dan perilaku intoleransi di Indonesia sebenarnya sangat mengkhawatirkan terhadap keberagaman Indonesia yang terbingkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah dibangun menjadi bangunan negara bangsa sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Intoleransi merupakan tangga awal dari terorisme, dimana intoleransi merupakan benih munculnya radikalisme, kemudian akan menyebabkan munculnya aksi terorisme. Terorisme yang ada di tengah masyarakat berawal dari sikap dan perilaku intoleransi yang kemudian termanifestasikan dalam aksi teror. Aksi terorisme sangat membahayakan kemanusiaan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keadaan pluralisme, multikulturalisme, dan inklusifisme. Untuk dapat memerangi terorisme maka diperlukan upaya mendeteksi akar terorisme yang bermuara pada sikap intoleransi dan radikalisme. Pelaku teror yang selama ini melakukan aksi terorisme memiliki ideologi yang cenderung tidak toleran terhadap keberbedaan, heterogenitas, dan anti kebhinekaan. Sikap yang tidak mau berbeda, menganggap dirinya yang paling benar, bahkan memiliki otoritas kebenaran, sehingga meniadakan orang lain, menganggap orang lain salah, memaksakan kehendak kepada orang lain, adalah cerminan perilaku yang mengarah pada radikal. Radikalisme diwujudkan dengan melakukan pengrusakan, penistaan, pengkafiran, perusakan fasilitas publik yang dianggap berbeda dengan keyakinannya.

Perilaku radikal hanya bisa dicegah dengan cara menghapus sikap intoleransi di tengah masyarakat. Sikap-sikap toleransi, kebersamaan, harmoni, kebhinekaan yang terbungkus dalam ideologi Pancasila harus dikedepankan di semua lapisan masyarakat. Bahkan pendidikan keluarga sejak balita harus dilakukan secara gencar dan masif agar setiap orang Indonesia memahami keberagaman, heterogenitas, dan kebhinekaan secara terbuka, berpikiran terbuka, dan modern dalam berpikir, bertindak, dan berbuat sebagaimana amanat dalam Pancasila. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa Pancasila cenderung diabaikan di tengah kehidupan masyarakat yang modern, di era globalisasi, dan di era revolusi industri. Ditandai dengan adanya perkembangan media sosial dan dunia maya yang sangat masif dan memungkinkan setiap manusia mendapatkan akses informasi secara cepat melalui gadget pribadi, sehingga akan mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup generasi muda. Lahirnya generasi yang konsumernis, hedonis, individualis, dan liberalis. Selain itu juga akan muncul perilaku anarkis, radikal, dan fanatisme tertentu akibat perkembangan informasi di media sosial yang belum tentu kebenarannya.

Survei dari Kemendagri pada tahun 2019 menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan tentang eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Data survei menunjukkan bahwa 19,4 % pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia tidak setuju dengan Pancasila. Penolakan terhadap ideologi Pancasila akan

menjadi penyebab lemahnya ketahanan nasional dan membahayakan keamanan nasional. Penyebab turunnya ketahanan nasional Indonesia adalah karena penurunan masalah ideologi Indonesia yakni Pancasila. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di tahun 2017 juga melakukan penelitian dengan melibatkan beberapa perguruan tinggi dan peneliti sosial di Indonesia terkait radikalisme dan wawasan kebangsaan pada pelajar dan mahasiswa. Hasilnya sekitar 23 persen pelajar dan mahasiswa siap menegakkan sistem khilafah. Hal ini tentu merupakan permasalahan yang mengkhawatirkan yang terdapat di generasi muda / milenial terdidik di dunia pendidikan.

2. Faktor – Faktor yang dapat mempengaruhi berkembangnya tindak radikalisme di Indonesia

Ideologi yang tidak seimbang akan selalu memiliki hubungan terhadap sikap warga Indonesia, ataupun sebagai individu. Hal ini pun menyebabkan warga Indonesia lupa akan jati dirinya dan visi misi negaranya sendiri. Dikarenakan harus menghadapi ketidakstabilan dalam menjalankan ideologi pancasila sehingga warga negara melupakan jati diri bangsa dan bahkan tujuan nasionalnya. Oleh karena itu, ideologi asing sangat mudah masuk dan menerobos melalui sarana media di era digital ini sehingga menyebabkan bergesernya sikap dan perilaku warga negara, hal ini seolah-olah menjadi identitas baru yang perannya bukan sebagai warga negara tetapi jadi penganut ideologi luar yang mempunyai pemikiran dan tujuan yang berbeda dari pancasila bahkan cenderung kontradiktif dengan nilai-nilai pancasila. Ketidakstabilan ini yang akan menjadi penyebab perilaku dan sikap warga negara berubah menjadi radikal yang lama kelamaan akan meletup, apalagi dengan adanya faktor pendorong dari lingkungan yang kurang baik dan mengajarkan sesuatu yang salah. Pertama, Faktor pemikiran. Yang dimana pada faktor ini meluasnya dua paham pada masyarakat islam, pertama bahwa agama ini adalah penyebab mundurnya agama islam, sehingga seorang islam menginginkan keunggulan dalam mengejar dari ketertinggalannya dan ia pun harus melepaskan keyakinan agama yang ia miliki.

Dapat disimpulkan bahwa paham ini adalah paham sekularisme yang anti terhadap agama. Yang kedua adalah pemikiran dimana memikirkan penentangannya terhadap alam semesta yang dianggap sudah tidak ditoleransi lagi, menganggap bahwa tidak akan lagi di datangkan keridhoan dan keberkahan dari Tuhan, dimana satu satunya harapan yaitu jalan selamat hanya kembali pada agama. Sehingga dengan dua pemahaman ini akan melahirkan tindakan radikal-destruktif yang melawan bagi bangsanya ataupun agama yang dipercayainya. Kemudian ada faktor kedua yaitu faktor ekonomi, dimana adanya ketertinggalan ekonomi yang menimbulkan seseorang yang perilakunya baik menjadi seseorang yang kejam yang bisa melakukan hal apapun termasuk melakukan teror. Ketiga, adanya faktor politik. Dimana pada faktor ini kestabilan diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi untuk rakyatnya merupakan cita cita atau tujuan negara. Hadirnya pemimpin yang adil, yang berpihak pada rakyat dan menjamin sebuah kebebasan hak haknya, maka akan lahir suatu kebanggaan sendiri warga negaranya dan akan selalu membela juga memperjuangkan negaranya. Keempat, adanya faktor sosial. Yang selalu muncul yaitu adanya pemahaman yang tidak sesuai atau menyimpang yaitu adanya konflik atau perselisihan yang terjadi dalam masyarakat. Banyak terjadi permasalahan yang menyerap perhatian masyarakat yang akhirnya mengarah kepada tindakan radikalisme, yang ujungnya menciptakan sekelompok orang untuk saling bercerai belai dengan masyarakatnya. Awalnya sikap ini menghindari kekacauan yang ada di masyarakat. Namun lambat laun berubah menjadi sikap yang memusuhi masyarakatnya sendiri. Kelima, Faktor psikologis. Salah satunya ada kepahitan semasa hidupnya, dilingkungan atau ditempat pekerjaannya.

Hal ini juga dapat mendorong perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan dan anarkis. Terjadi akibat kegagalan yang diderita semasa hidupnya, dan akibatnya dia akan terisolasi dari masyarakat. Keenam, yaitu faktor pendidikan. Meskipun pendidikan bukan faktor yang langsung dapat memunculkan gerakan terorisme, tetapi pendidikan akan berdampak sangat berbahaya jika pendidikannya keliru. Maka pendidikan agama harus lebih diperhatikan, karena pendidikan agama ini mengajarkan toleransi, kesantunan, dan membenci perselisihan. Maka lahir agama yang dianggapnya lebih benar dibandingkan yang lain maka timbulah pandangan harus diperangi, dan ini merupakan kesalahan dari pendidikan yang salah.

3. Implementasi Pancasila sebagai Obat Penangkal Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme.

Pancasila terdiri dari lima sila yang secara substansi merupakan nilai-nilai yang universal, yakni : nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan (musyawarah mufakat), dan nilai keadilan. Kelima nilai ini merupakan senyawa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam menggerakkan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila harus tersosialisasikan dan diajarkan secara terus menerus kepada semua komponen bangsa secara interaktif,

dialogis, dan menarik serta harus dihilangkan cara dan metode pembumian Pancasila yang doktriner, monologis, dan satu arah. Pancasila harus dapat menjadi nilai yang praksis, aplikatif, operasional, dan mampu dipahami serta dijamin secara mudah oleh semua komponen bangsa. Hal ini penting karena Pancasila harus dibumikan dan membumi. Pancasila harus menjadi bahasa yang mudah dicerna dalam tindakan yang konkret dan contoh yang riil dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, pada sila pertama mengandung dua nilai turunan, yaitu nilai kepercayaan dan nilai ketakwaan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila kurang mendapatkan tempat di hati sebagian kecil masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan sebagai sila pertama ini belum dihayati dan dijamin. Hal ini dapat kita lihat dari cerminan masih adanya kelompok yang menginginkan tujuh kata pada Piagam Jakarta ditumbuhkan kembali. Sudah menjadi kesepakatan bangsa bahwa Indonesia bukan negara agama, melainkan adalah negara yang mendasarkan bangsanya pada Pancasila. Namun demikian pada kenyataannya, masih ada keinginan untuk membentuk negara agama. Alergi terhadap agama lain, dan cenderung sempit dalam memandang ajaran agama sehingga timbul potensi konflik intra agama dan antara agama.

Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan harus diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat, baik di lingkungan masyarakat, keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan lainnya. Semua agama pada dasarnya mengajarkan cinta dan kasih sayang dengan dasar toleransi, saling menghormati, tenggang rasa antar pemeluk agama. Nilai ketuhanan Pancasila justru mengharuskan kepada semua warga negara untuk memeluk agama dan aliran kepercayaannya masing-masing tanpa harus menyudutkan agama lainnya. Sikap intoleransi, radikalisme, dan terorisme harus dihapus dan dihilangkan melalui program deradikalisasi, dimana nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila harus mampu diserap, dipahami, dan dijamin oleh semua komponen bangsa. Tidak dalam kapasitas merusak, menyiksa, membunuh, dan merugikan orang lain yang merupakan perbuatan dosa. Para pelaku terorisme harus memahami bahwa nilai ketuhanan menganjurkan agar yang mayoritas melindungi yang minoritas dan yang minoritas menghormati yang mayoritas. Ketuhanan Yang Maha Esa, bermakna: Dasar kehidupan bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Jaminan memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaan; Toleransi antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan; Hak dan kebebasan mengembangkan agama dan kepercayaan, tanpa melanggar kebebasan yang lain.

Sila kedua Pancasila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Realitas yang terlihat selama ini menunjukkan bahwa nilai sila kedua Pancasila belum terpatri semuanya dalam hati nurani semua masyarakat Indonesia. Masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang menghormati hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam aturan perundang-undangan, semua warga negara wajib membela negara. Dalam prakteknya masih ada kelompok masyarakat yang menolak bela negara dan mengusulkan untuk melakukan bela agamanya bukan bela negaranya. Sebagai contoh perilaku yang menistakan nilai-nilai dalam menghalangi orang beribadah, menolak pendirian tempat ibadah, merusak rumah ibadah, mengintimidasi pemeluk agama lain, dan membuat kebijakan publik yang merugikan. Konsepsi pengamalan sila kedua Pancasila ini akan memberikan acuan bagaimana kita sebagai manusia memiliki cara pandang memandang manusia itu sama antara satu dengan yang lainnya. Penguatan nilai-nilai ini adalah dengan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) pada diri setiap manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bermakna: Pengakuan negara terhadap hak tiap bangsa menentukan nasibnya sendiri; Perlakuan tiap manusia secara adil, sama, dan sederajat; Jaminan negara terhadap hukum dan pemerintah secara sama, dengan kewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”. Persatuan berasal dari kata satu artinya tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beranekaragam menjadi suatu kebulatan. Sila Persatuan Indonesia tercermin Nilai Persatuan di dalamnya yang merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah penjelmaan sifat kodrati manusia monodualis yaitu sebagai individu dan makhluk sosial. Perilaku yang sesuai dengan nilai sila “Persatuan Indonesia” seperti bekerjasama, bergotong royong serta dalam kebudayaan melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, bahasa, alat musik dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan Indonesia, bermakna: Perlindungan negara terhadap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; Peran negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan; Pengakuan negara terhadap Bineka Tunggal Ika.

Sila keempat Pancasila “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Sila keempat Pancasila mengandung nilai kerakyatan, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nilai ini erat kaitannya dengan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat serta untuk rakyat. Makna dari hikmat kebijaksanaan dalam sila keempat diartikan menggunakan akal sehat dalam segala sesuatu, sedangkan permusyawaratan diartikan sebagai musyawarah dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat serta perwakilan berarti sistem yang dianut dalam perwakilan rakyat. Sila keempat juga mengandung nilai malakukan dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan serta menghormati perbedaan pendapat yang ada, hal ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari yang juga harus diterapkan dalam bermasyarakat. Pancasila sila keempat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan perwakilan” dimana mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah serta dengan tekad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, bermakna: Kedaulatan di tangan rakyat; Keputusan dengan asas musyawarah mufakat, dengan pengecualian suara terbanyak jika tidak tercapai mufakat; Negara berdasar atas hukum (rechstaat), bukan kekuasaan belaka (machstaat); NKRI berdasarkan konstitusi tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas).

Sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam sila kelima mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi dan yang lainnya. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Keadilan sosial pada sila kelima mengandung makna pentingnya hubungan antar manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna : Perekonomian disusun dengan asas demokrasi ekonomi; Penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; Kekayaan Indonesia untuk kemakmuran rakyat; Perlakuan adil terhadap setiap orang Indonesia di segala bidang; Hak pendidikan bagi setiap warga negara. Terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nilai-nilai Pancasila itu sendiri diangkat dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan secara nyata Bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum membentuk Negara. Realisasi serta pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara nyata merupakan suatu keharusan baik secara moral maupun hukum, karena nilai-nilai Pancasila yang mulia tersebut tidak ada artinya tanpa direalisasikan secara nyata dalam kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang digali dari nilai-nilai luhur yang ada dalam diri bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, Artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang bersifat umum dan juga dapat bersifat khusus.

Persoalan munculnya radikalisme di Indonesia dapat pula disebabkan karena bangsa Indonesia melupakan nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang mempunyai nilai moral positif sebagai upaya pencegahan terhadap aksi terorisme. Eksistensi manusia harus berdialog dalam hidup bersama melalui nilai-nilai Pancasila yang pada nantinya akan membawa kedamaian, ketenteraman, dan penuh kasih sayang antar sesama manusia, dengantujuan agar Tuhan pun mencintai manusia. Jika sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa ini mampu dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya, aksi terorisme dapat dihindari sejak dini. Pancasila memuat makna keberagaman dan kebersamaan yang dapat mencegah aksi terorisme. Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila kedua ini menekankan bahwa setiap warga negara harus selalu menghargai harkat dan martabat orang lain, tidak boleh berbuat tercela menghina atau bahkan melakukan ancaman atau teror. Harkat dan martabat manusia harus dijunjung dengan cara yang adil dan beradab. Pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan yakni kedudukan dan derajat yang sama. Saling mencintai sesama manusia. Sila ketiga, upaya merajut rasa kebangsaan dan cara mengatasi persoalan terorisme harus dipererat kembali dengan mengimplementasikan sila ketiga atas Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga aksi terorisme dapat diatasi.

Ada banyak upaya untuk mencegah penyebaran paham radikalisme, diantaranya dengan menggerakkan lagi pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Para pemuda sebagai seseorang yang

akan menjadi penerus bangsa harus dengan semangat untuk mempelajari, memahami dan mengimplementasikan Pancasila sehingga terjadi prinsip yang kuat dalam setiap individu paragenarasi penerus. Kemudian, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) mengenalkan pendidikan Pancasila gaya baru. Dengan pembaharuan dalam mengenalkan pendidikan Pancasila diharapkan anak muda akan lebih tertarik dan peduli lagi terhadap Pancasila sehingga paham radikal bisa disangkal oleh para generasi muda termasuk paham radikal yang menyangkut agama.

Tidak hanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, jika sila ke-2 dan ke-5 diamalkan dan diwujudkan, ide mengenai negara khilafah atau ide-ide radikal lainnya tidak akan diterima masyarakat Indonesia. Namun demikian juga, selama masih ada tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat juga memberikan sumbangsih terhadap berkembangnya gagasan-gagasan radikal. Lalu di zaman serba digital yang penuh dengan keterbukaan ini bisa juga dilakukan upaya mencegah propaganda paham radikal melalui media. Peran media menjadi hal yang penting sebagai respon dalam menghadapi ancaman asimetris, mempunyai peranan sangat strategis dan efektif yang dapat mempengaruhi, baik situasi nasional, regional maupun internasional diberbagai bidang. Kekuatan media dapat dijadikan alat untuk merubah persepsi, opini dan kontrol sosial yang mengarah kepada kebijakan publik.

Karena persepsi dan nilai-nilai yang disampaikan oleh media bisa menjadi persepsi secara keseluruhan orang. Melalui berita-berita yang disiarkan, secara tidak langsung telah memberikan referensi kepada masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik, termasuk dalam hal pemberantasan radikalisme dan terorisme. Upaya untuk mencegah paham radikal tidak akan berdampak signifikan tanpa bantuan media, baik cetak, elektronik maupun online, karena tanpa kehadiran media, himbauan, fatwa, peringatan dan pemikiran pemangku kepentingan tidak akan ter ekspose ke publik. Media massa merupakan elemen integral dan penting dari masyarakat lokal, nasional, regional, maupun global untuk menyediakan berbagai kebutuhan informasi bagi masyarakat. Karenanya dalam mengatasi akar terorisme yang bermotif ideologis, doktrinal, serta penyebarannya yang bervariasi, sinergitas lembaga aparat keamanan dibantu dengan peran berbagai pihak, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh politik, tokoh agama, dan kontribusi dari media sangat diperlukan agar paham radikalisme dan terorisme di masyarakat tidak berkembang menjadi kekuatan yang dapat memecah NKRI.

SIMPULAN

Sebagai ideologi bangsa dan negara, Pancasila harus menjadi yang paling utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Adanya konsep ideologi terbuka bukan berarti Indonesia bisa menerima segala macam ideologi dari luar, karena dalam hal ini tentu dibatasi oleh Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah bentuk penyaringan, dan akan menolak ideologi luar yang bertentangan dengan kelima asas Pancasila. Ancaman akan selalu ada, maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menimbang seberapa besar pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Seperti radikalisme contohnya, ini adalah ancaman nyata yang sudah merajalela di Indonesia baru-baru ini. Tidak bisa dibiarkan begitu saja, setelah penelitian ini harus ada tindak lanjut, yakni revitalisasi atau pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dengan sebenar-benarnya dalam kehidupan bermasyarakat. Misal bisa dimulai dengan gerakan sosialisasi, dengan menyebarkan beberapa manusia Pancasila ke seluruh wilayah Indonesia yang nanti dapat mencontohkan langsung bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Agungwidodo. Sampaiujungpelangi.blogspot.com/2016/03/makalahimplementasi-nilai-nilai-Pancasila.html?m=1).
- Chosilin, 2013. Ilmu Kewarganegaraan (Civics). Yogyakarta: Ombak. Baharudin Lopa, Alqur'an dan HAM, PT Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta. 1996.
- Dwiyanti Sri Harini ddk. 2012. Pendidikan kewarganegaraan. pustaka pelajar, Yogyakarta
- Depertemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indpnesia, Edisi ke 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dewantara, Ki Hajar, Karya Kihajar Dewantara Bagian II: Kebudayaan, Offset Taman Siswa: Yogyakarta. 1994.

- JWM, Bakker SJ., 1984, Filsafat kebudayaan, pustaka filsafat, BPK Gunung Mulia, kanisius, Yogyakarta
- Koentjaraningrat, Prof. Dr. 1999. Manusia dan kebudayaan di Indonesia, Djambatan, Jakarta
- Mahendra, Putu Ronny Angga. (2018). Pembelajaran PPKn dalam Resonansi Kebangsaan dan Globalisasi. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Mahendra, Putu Ronny Angga. (2014). Peran Strategis PPKn untuk Membangun Karakter bagi Mahasiswa. Jurnal Widya Acarya Vol. 3 No. 1. Universitas Dwijendra Denpasar.
- Mahendra, Putu Ronny Angga. (2020). Memperkuat Kesadaran Bela Negara Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Kekinian. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 3 . Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha.
- Mahendra, Putu Ronny Angga dan I Made Kartika. (2021). Membangun Karakter Berlandaskan Tri Hita Karana Dalam Perspektif Kehidupan Global. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 2. Singaraja : Universitas Pendidikan Ganesha.
- Rahayu Sri. 2016:27. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Jakarta: Bumi aksara
- Sidiq.<http://sosiologis.com/nilai-nilai-pancasila/amp?>. bahasa, multi budaya, dan multi ras, yang bergambar dalam Bhineka Tunggal Ika.
- Windarti, Y., Slameto, & Widyanti, E. (2018). Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Melalui Penerapan Model Discovery Learning Dalam Pembelajaran Tematik Kelas 4SD. Jurnal Pendidikan Berkarakter, Vol. 1(No.1), 150-155.